

IMPLEMENTASI RUMAH LAYAK HUNI DALAM MENGATASI ANGKA KEMISKINAN DI KABUPATEN ALOR PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PUTU WISNU ANDIKA ADHI PRATAMA

NPP. 30.1150

Asdaf Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur

Program Studi Administrasi Pemerintahan Daerah

Email: pp238667@gmail.com

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): Poverty is something that is familiar to the Indonesian people and can be said to be attached to the daily lives of Indonesian people. Poverty has become a social problem that needs to be taken seriously by the Indonesian government, although in reality the problem of poverty has not been overcome by the Indonesian government despite decades of independence. Livable housing is a program created by the government through the Ministry of Public Works and Public Housing. Where this program was created aims to meet human needs in the housing sector and one of them is to overcome poverty in this case for those who do not have sufficient income to build a house according to the criteria for livable homes. **Purpose:** This research was conducted to find out the implementation of government policies in overcoming poverty through the livable house program. By paying attention to how the implementation of the construction of livable houses and paying attention to the inhibiting and supporting factors in the process of implementing this policy.

Method: This research uses descriptive qualitative methods. The data obtained is through observation, interviews and documentation which are then analyzed using a deductive mindset. The data is referred to based on the results of interviews with employees at the housing office of the settlement area and land of the Alor district as well as through field observations. The data obtained is then presented, analyzed, reduced, then conclusions are drawn. **Result:** The results of this research show that, the implementation of the livable house program in an effort to overcome the poverty rate from the board sector in Alor Regency has been running well but not maximally. It is said to have gone well because it can be seen from the socialization of the Government Program on Livable House Assistance, Clarity and understandability regarding Standard Operating Procedures by Employees of the Public Housing Office of the Settlement and Land Regions of Alor Regency, but it is still not optimal or still not maximized utilization. which is an obstacle to the implementation of the Livable House Program in an effort to overcome poverty in Alor Regency, namely the lack of self help from beneficiaries or the inability to self-help for the construction of livable houses, lack of monitoring or supervision.

Conclusion: so the conclusion that can be drawn is that the policy related to livable housing will be able to run optimally if there is good communication and collaboration between the beneficiary communities and the Alor district government. It is recommended that the government before providing assistance can socialize it in detail and maximally.

Keywords: Implementation, Livable Homes, Poverty

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Kemiskinan merupakan suatu hal yang tidak asing lagi ditelinga masyarakat Indonesia dan dapat dikatakan melekat dengan kehidupan masyarakat Indonesia sehari-hari. Kemiskinan telah menjadi masalah sosial yang perlu ditanggapi serius oleh pemerintah Indonesia, meskipun pada kenyataannya masalah kemiskinan belum bisa diatasi pemerintah Indonesia walau sudah merdeka puluhan tahun lalu. Rumah layak huni merupakan program yang dibuat pemerintah melalui kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat. Dimana program ini dibuat bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia pada sektor papan dan salah satunya untuk mengatasi angka kemiskinan dalam hal ini bagi mereka yang tidak mempunyai penghasilan yang cukup untuk membangun rumah sesuai dengan kriteria rumah layak huni. **Tujuan:** Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui implementasi kebijakan pemerintah dalam mengatasi angka kemiskinan melalui program rumah layak huni. Dengan memperhatikan bagaimana pelaksanaan pembangunan rumah layak huni serta memperhatikan faktor penghambat dan pendukung dalam proses implementasi kebijakan ini. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode campuran dan analisis terhadap tahap partisipasi menurut Teori Yadav. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan angket (50 responden), wawancara mendalam (7 informan), dan dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa, Implementasi Program rumah layak Huni Dalam Upaya mengatasi angka Kemiskinan dari sektor Papan di Kabupaten Alor sudah berjalan dengan baik namun belum maksimal. Dikatakan sudah berjalan dengan baik karena dilihat dari adanya sosialisasi Program Pemerintah Tentang Bantuan Rumah Layak Huni, Kejelasan serta mampu dimengerti terkait Standar Operasional Prosedur oleh Pegawai Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan kabupaten Alor Namun masih belum Optimal atau masih belum maksimal pemanfaatannya. yang menjadi Penghambat Belum Optimalnya Implementasi Program Rumah Layak Huni dalam Upaya mengatasi angka Kemiskinan di Kabupaten Alor yaitu Kurangnya Swadaya masyarakat penerima bantuan atau ketidakmampuan dalam swadaya untuk pembangunan rumah layak huni, Kurangnya Monitoring atau Pengawasan. **Kesimpulan:** jadi kesimpulan yang dapat diambil ialah kebijakan terkait rumah layak huni ini akan dapat berjalan optimal apabila terjadi komunikasi dan kolaborasi yang baik antara masyarakat penerima bantuan dan pemerintah kabupaten Alor. Disarankan pemerintah sebelum memberikan bantuan dapat mensosialisasikannya secara detail dan maksimal. **Kata kunci :** Implementasi, Rumah layak huni, Kemiskinan

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kemiskinan merupakan suatu hal yang tidak asing lagi di telinga masyarakat Indonesia dan dapat dikatakan melekat dengan kehidupan masyarakat Indonesia sehari-hari. Kemiskinan telah menjadi masalah sosial yang perlu ditanggapi serius oleh pemerintah Indonesia, meskipun pada kenyataannya masalah kemiskinan belum bisa diatasi pemerintah Indonesia walau sudah merdeka puluhan tahun lalu. Pada dasarnya golongan masyarakat dapat dikatakan kurang mampu bila pendapatan golongan masyarakat tersebut tidak cukup untuk memenuhi kebutuhannya, yang mana terdiri dari tiga macam diantaranya kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier.

Menurut Badan Pusat Statistik Republik Indonesia terdapat beberapa kriteria yang menjadi tolak ukur suatu rumah dikatakan sebagai rumah yang layak huni yakni sebagai berikut:

1. Luas bangunan rumah tempat tinggal paling kecil 7,2 m² / kapita.
2. Mempunyai akses untuk penyediaan kebutuhan air minum yang layak untuk dikonsumsi.
3. Mempunyai akses terhadap sanitasi yang Layak.
4. Mempunyai ketahanan bangunan yang memadai termasuk bahan konstruksinya.

Berdasarkan kriteria ini, maka setelah didata oleh Badan Pusat Statistik pada tahun 2019, ada sekitar 4,30% masyarakat Indonesia yang masih menempati hunian yang tidak layak. Dengan melihat kondisi ini maka pemerintah merasa perlu dan akhirnya melakukan berbagai usaha untuk mengatasi hal ini, salah satunya adalah dengan melaksanakan program pemberian bantuan rumah layak huni yang diharapkan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat akan papan. Program ini dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat yang kurang mampu atau miskin mengingat rumah yang dimiliki oleh masyarakat yang kurang mampu sangat jauh dari kriteria fisik rumah yang layak di huni. Hal ini dilakukan juga demi memenuhi hak setiap masyarakat untuk memiliki rumah yang layak huni. Tahun 2019 World Bank mengklaim bahwa penanganan rumah tidak layak huni penting terutama dalam mencegah terpuruknya masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dalam kondisi kemiskinan di Indonesia. Rumah layak huni bagi masyarakat dengan penghasilan rendah masih sangat sedikit aksesnya dikarenakan biaya untuk memiliki rumah semakin mahal dari waktu ke waktu.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Ada beberapa permasalahan berkaitan Rumah Layak Huni Dalam Mengatasi Angka Kemiskinan Di Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur. jumlah rumah tidak layak huni di Kabupaten Alor adalah 7.226 rumah. Pembangunan rumah layak huni di Kabupaten Alor sudah berjalan sejak tahun 2017 dan sampai dengan tahun 2022 ini sudah mencapai 4.664 unit rumah. Jumlah backlog atau rumah layak huni belum dibangun di Kabupaten Alor sendiri mencapai 4.901 unit rumah untuk 17 Kecamatan. Jumlah tersebut diharapkan dapat menutupi ataupun dapat menjadi pengganti RTLH yang dapat dikatakan banyak tersebut. (Sumber: Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kabupaten Alor)

Namun pelaksanaan program Rumah Layak Huni belum dapat dimaksimalkan. Hal ini ditunjukkan dengan data kemiskinan yang nampak belum berubah secara signifikan dari tahun ke tahun. Bisa ditarik kesimpulan dari pernyataan diatas bahwa selain sandang dan pangan, rumah juga menjadi indikator kemiskinan. Rumah layak huni sendiri pada dasarnya bukan dilihat dari baik atau buruknya rumah, tetapi memenuhi atau tidak memenuhi kriteria rumah layak huni. Di kabupaten alor, dengan jumlah angka kemiskinan yang lumayan besar tersebut, memengaruhi jumlah rumah layak huni yang dimiliki masyarakat. Karena penghasilan yang rendah, akhirnya masyarakat membuat rumah dengan keadaan seadanya tanpa memperhatikan kriteria-kriteria rumah layak huni. Sebagian masyarakat juga masih banyak yang menggunakan bahan yang kurang layak seperti dinding dari bambu yang dianyam, ataupun menggunakan pelepah kelapa. Melihat dari data diatas dapat disimpulkan pencapaian dari pemerintah dalam mengatasi angka kemiskinan yang ada di masyarakat berdasarkan sektor papan atau rumah yang layak dihuni serta keikutsertaan masyarakat dalam mensukseskan program yang diusung pemerintah dalam menyediakan hunian yang layak bagi masyarakat kurang mampu di kabupaten alor provinsi nusa tenggara timur.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, baik dalam konteks pemberdayaan pemuda maupun konteks kegiatan membudayakan literasi masyarakat. Penelitian Bambang Winarno (2018) dengan judul Evaluasi program Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Miskin Di Kabupaten Belitung, dengan tujuan penelitian Mengetahui kendala dan kelemahan dalam pelaksanaan program rumah layak huni di kabupaten Belitung. Dan menunjukkan hasil Program rumah layak huni

di kabupaten belitung masih belum efektif karena ditemukan masih banyak kelemahan dan kekurangan dalam pelaksanaan program rumah layak huni ini. Selanjutnya penelitian Ibnu Abbas (2017) dengan judul Evaluasi Kebijakan Pembangunan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Miskin Di Kota Samarinda, dengan tujuan penelitian Mengetahui sejauh mana keberhasilan kebijakan pembangunan rumah layak huni di kota Samarinda, dengan hasil Pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat miskin di provinsi Kalimantan Timur dapat dinyatakan cukup berhasil dari segi efektivitas dalam meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang layak dan sejahtera. Dan yang terakhir berjudul Implementasi Program Bantuan Rumah Layak Huni Untuk Masyarakat Kurang Mampu Di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau oleh Safi'I (2019) dengan tujuan penelitian Menganalisis implementasi dan hambatan dalam pelaksanaan program rumah layak huni di kecamatan bagan sinembah kabupaten rokan hilir dan hasil Program Bantuan Rumah Layak Huni Untuk Masyarakat Kurang Mampu Di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau tidak berjalan dengan optimal, jika dilihat dari penyampaian sosialisasi yang tidak menyeluruh dan tidak tepat sasaran.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni Dari hasil pemetaan diatas, dapat dilihat perbedaan dan persamaan yang dimiliki pada penelitian saat ini dan penelitian sebelumnya yang terdapat pada beberapa aspek, seperti judul penelitian dan lokasi penelitian. Berdasarkan judul penelitian ini dan penelitian sebelumnya terdapat perbedaan yaitu pada penelitian sebelumnya membahas terkait Evaluasi sementara pada penelitian ini membahas terkait Implementasi. kemudian untuk lokasi penelitian terdapat perbedaan dimana pada penelitian sebelumnya dilakukan di kabupaten Belitung, kota Samarinda, dan kecamatan Bagan Sinembah kabupaten Rokan Hilir dan untuk persamaan di antara penelitian sebelumnya dengan penelitian saat ini yaitu sama-sama menggunakan Metode penelitian kualitatif deskriptif.

1.5. Tujuan.

Penelitian ini bertujuan untuk Mengetahui dan menganalisis Implementasi program rumah layak huni dalam upaya pengentasan kemiskinan di kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur.

II. METODE

Metode kualitatif adalah pendekatan penelitian yang penulis gunakan dalam melakukan penelitian saat ini. Menurut Moleong (2016:6) menyatakan bahwa, Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi tindakan, dll, secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan dengan memlanflalatklan berbagai metode lallamilah.

Penulis mengumpulkan data melalui angket, wawancara, dan dokumentasi. Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap 9 orang informan yang terdiri dari Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Kepala Bidang Perumahan Rakyat, Kepala Seksi Perencanaan Perumahan, Tokoh Masyarakat dan Masyarakat Penerima Bantuan). Adapun pengumpulan data Kuantitatif dilaksanakan dengan menyebarkan angket terhadap 50 orang yang memanfaatkan lorong literasi Paccinongang. Adapun analisisnya menggunakan teori partisipasi yang digagas oleh Yadav R (Yadav, 1980) yang menyatakan bahwa partisipasi dapat terjadi pada empat tahap, yaitu partisipasi dalam perencanaan/pengambilan keputusan, pelaksanaan, dan pemanfaatan hasil.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebagai hasil dari Proses penelitian, maka penulis akan membahas hasil penelitian yang dilakukan berkaitan dengan Implementasi Program Rumah Layak Huni dalam mengatasi angka kemiskinan di Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dalam menganalisis Implementasi program pemerintah dalam menurunkan angka kemiskinan melalui program rumah layak huni di kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur penulis menggunakan Teori Implementasi Dari Edward III. Menurut Edward III (Agustino (2014)) terdapat empat faktor atau Variabel dalam Implementasi Kebijakan, Yaitu: 1. Komunikasi 2. Sumber Daya 3. Disposisi 4. Struktur Birokrasi

3.1 Komunikasi

penyebaran informasi telah dilaksanakan dengan baik melalui rapat serta sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan permukiman dan Pertanahan Kabupaten Alor. Selain itu informasi tersebut diperkuat dengan adanya surat edaran kepada para camat serta didukung dengan Peraturan Bupati Alor No 29 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Rumah Tidak Layak Huni Di Kabupaten Alor.

3.2 Sumber Daya

bahwa pegawai yang ada di kantor Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan pertanahan Kabupaten Alor adalah pegawai-pegawai yang berkompeten serta memiliki semangat untuk bekerjasama di bidangnya masing-masing terkhusus pegawai yang terlibat langsung dalam implementasi program rumah layak huni dari pemerintah. teknis pelaksanaan pembangunan rumah layak huni di masyarakat berjalan dengan baik karena ada tenaga pendamping yang mengawasi jalannya pembangunan rumah layak huni di kabupaten Alor

3.3 Disposisi

Faktor yang tak kalah penting juga dalam pelaksanaan suatu kebijakan publik yaitu disposisi. Karena apabila pelaksanaan suatu kebijakan atau program dapat tercapai secara efektif, maka para pelaksana tidak hanya mengetahui hal apa yang akan dilakukan akan tetapi harus bisa memiliki kemampuan dalam melaksanakannya. Dalam implementasi program rumah layak huni komitmen para pegawai dalam bekerja sangat diharapkan. insentif dapat mempengaruhi kinerja pegawai dalam melakukan pekerjaan, apabila diberikan insentif maka dapat meningkatkan semangat, Motivasi serta tanggung jawab pegawai dalam menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.

3.4 Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi sangat berpengaruh dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Dalam pelaksanaan kebijakan yang begitu kompleks mengharuskan adanya kerjasama banyak orang, ketika struktur birokrasi tidak kondusif dalam pelaksanaan kebijakan maka dapat menghambat implementasi suatu kebijakan. Sangat dibutuhkan struktur birokrasi yang baik untuk bisa mendukung kebijakan agar tercapai pada tujuan utama dari penerapan program rumah layak huni dalam upaya pengentasan kemiskinan di kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur.

3.5 Penyebab Belum Optimalnya Implementasi Program Rumah Layak Huni Dalam mengatasi angka Kemiskinan Di Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur

Dalam proses implementasi kebijakan pemerintah tidak selalu berjalan lancar sesuai dengan yang diharapkan atau yang diinginkan, Kendala atau hambatan pasti selalu ada dan terjadi dalam pelaksanaan kebijakan. Adapun Kendala atau hambatan yang ditemui dalam Implementasi Program rumah layak huni di kabupaten Alor, yaitu sebagai berikut:

1. Kurangnya Swadaya masyarakat penerima bantuan

Dalam Implementasi Program rumah layak huni di Kabupaten Alor tidak sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah akan tetapi adanya swadaya juga dari masyarakat penerima bantuan. Berdasarkan Wawancara dengan kepala bidang perumahan rakyat , KEPAS D.SENLAU,SH pada hari selasa tanggal 17 Januari 2023 pukul 09.00 WITA beliau menyampaikan bahwa: Program bantuan rumah layak huni yang sementara berjalan di kabupaten Alor tidak sepenuhnya ditanggung oleh Pemerintah, masyarakat juga ikut ambil bagian di dalamnya. Pemerintah hanya menyediakan Anggaran untuk Bahan Bangunan sedangkan untuk tenaga kerja ditanggung oleh masyarakat penerima bantuan. Untuk penyediaan tenaga kerja tentu memerlukan biaya dari masyarakat hal ini yang menjadi beban bagi masyarakat penerima bantuan karena harus mencari biaya untuk membayar tenaga kerja.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan diatas maka dapat disimpulkan bahwa swadaya yang ditanggungkan oleh pemerintah kepada masyarakat penerima bantuan dinilai masih memberatkan karena semua penerima bantuan merupakan masyarakat penghasilan yang rendah. Sehingga hal ini menjadi satu Hambatan yang membuat Program bantuan rumah ini menjadi terhambat atau tidak mencapai Target.

2. Kurangnya Monitoring atau Pengawasan

Monitoring atau pengawasan dalam suatu pekerjaan atau program sangat diperlukan guna suatu program yang dikerjakan tetap berada pada jalurnya sesuai dengan pedoman pelaksanaan yang sudah ditetapkan. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan kepala bidang perumahan rakyat , beliau menyampaikan bahwa: Kami sedikit terkendala dalam hal monitoring proses pembangunan program rumah layak huni di daerah pelosok misalnya seperti di desa Motongbang karena jarak yang sangat jauh dari ibu kota kabupaten dan juga akses jalan yang buruk atau berlubang apalagi di musim hujan saat ini sangat sulit untuk dilewati sehingga untuk wilayah tersebut kurang dimonitoring.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan di atas maka dapat disimpulkan bahwa dalam hal monitoring dan pengawasan pembangunan rumah layak huni di daerah pelosok masih kurang atau jarang dilakukan karena terkendala jarak yang jauh serta medan jalan yang buruk yang membuat sulit untuk dilewati kendaraan. jadi pembangunan di daerah pelosok sedikit terhambat karena kurang pendampingan.

3. Terlambatnya suplai bahan bangunan

Dalam pembangunan rumah tentu saja bahan bangunan merupakan salah satu komponen utama yang menunjang dalam proses untuk menyelesaikan pekerjaan pembangunan. Berdasarkan wawancara Berdasarkan Wawancara dengan kepala bidang perumahan rakyat , KEPAS D.SENLAU,SH pada hari selasa tanggal 17 Januari 2023 pukul 09.00 WITA beliau menyampaikan bahwa: Untuk penyediaan bahan bangunan sering sekali kami mendapat laporan karena terlambat untuk diantar ke lokasi pembangunan rumah. Setelah ditelusuri penyebabnya maka didapatkan informasi bahwa keterlambatan ini terjadi dikarenakan beberapa faktor penyebab seperti habisnya persediaan bahan bangunan di Toko karena jumlah permintaan bahan bangunan yang begitu besar dan juga bisa disebabkan karena naiknya harga bahan bangunan setelah penandatanganan kontrak kerjasama dengan pihak toko bangunan.

Jadi berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa terlambatnya suplai bahan bangunan ke daerah pelosok disebabkan karena habisnya persediaan bahan bangunan di Toko dan juga karena naiknya harga bahan bangunan setelah selesai kontrak kerjasama. Jadi akibat keterlambatan ini menyebabkan pembangunan rumah layak huni menjadi terhambat dan semakin lama penyelesaian pembangunan.

4. Adanya Intervensi Politik

Berdasarkan Wawancara dengan kepala bidang perumahan rakyat , KEPAS D.SENLAU,SH pada hari selasa tanggal 17 Januari 2023 pukul 09.00 WITA beliau menyampaikan bahwa: Untuk pengajuan nama-nama calon penerima bantuan di setiap desa dilakukan oleh kepala desa bersama perangkat dan juga untuk penentuan desa atau kelurahan mana yang mendapat bantuan rumah di tentukan oleh bupati. Bupati dan kepala Desa dipilih secara demokrasi melalui pemilihan umum jadi bisa dibilang untuk pemilihan wilayah mana dan siapa saja yang menerima bantuan tersebut masih ada politik balas jasa untuk pendukung politik pada saat pemilihan. Jadi berdasarkan hasil wawancara tersebut maka dapat dikatakan bahwa kurangnya pemerataan dalam penentuan penerima bantuan dari Program Rumah Layak Huni sebagai akibat dari intervensi politik balas jasa kepada pendukung politik pada saat pemilihan umum

5. Masyarakat yang tidak mampu untuk Swadaya tidak bisa memperoleh bantuan

Dalam Implementasi Program rumah layak huni di Kabupaten Alor tidak sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah akan tetapi adanya swadaya juga dari masyarakat penerima bantuan Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan bapak Hans Awo selaku ketua Kelompok masyarakat pelaksana swakelola (KMPS) yang juga merupakan penerima bantuan, ketika diwawancarai pada hari rabu 18 januari 2023 pukul 10.00 WITA di rumahnya, Beliau mengatakan bahwa: Ketika di awal pengenalan terkait bantuan Rumah layak huni dari Pemerintah kepada masyarakat melalui sosialisasi, disitu dikatakan bahwa dalam Program pembangunan ini tidak sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah akan tetapi ada swadaya dari masyarakat juga berupa penyediaan tenaga kerja mendengar hal itu banyak masyarakat yang tidak mampu mengundurkan diri dari calon penerima bantuan karena merasa tidak mampu membiayai tenaga kerja karena untuk biaya tenaga kerja sendiri terbilang besar nominalnya berkisar antara Rp.10.000 sampai dengan Rp. 15.000 itu diluar buruh Tukang. Untuk nominal sebesar itu bagi masyarakat yang tidak jelas penghasilannya itu merupakan sesuatu yang sangat memberatkan. Jadi berdasarkan wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan Program rumah layak huni di kabupaten Alor terbilang belum optimal karena tidak mengikutsertakan masyarakat yang tidak mampu dalam menanggung swadaya sedangkan masyarakat yang lebih mampu diikutsertakan dalam program karena bisa menanggung swadaya

3.6 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Implementasi Program rumah layak Huni Dalam Upaya mengatasi angka Kemiskinan dari sektor Papan di Kabupaten Alor sudah berjalan dengan baik namun belum maksimal. Dikatakan sudah berjalan dengan baik karena dilihat dari adanya sosialisasi Program Pemerintah Tentang Bantuan Rumah Layak Huni, Kejelasan serta mampu dimengerti terkait Standar Operasional Prosedur oleh Pegawai Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan kabupaten Alor Namun masih belum Optimal atau masih belum maksimal pemanfaatannya. Hal ini dikarenakan atau dibuktikan dengan tidak tercapainya Target jumlah Pembangunan rumah layak huni di kabupaten Alor. Upaya pemerintah untuk membentuk kelompok swadaya masyarakat merupakan upaya yang cukup baik dimana pemerintah dapat memperkecil kemungkinan pembangunan rumah layak huni yang terlambat akibat kurangnya tenaga atau swadaya untuk membangun rumah layak huni. Dengan begitu masyarakat dapat saling membantu untuk membangun serta memanfaatkan bantuan rumah dari pemerintah dengan baik. Standar operasional prosedur yang diterapkan juga sudah dapat dikatakan baik dalam hal ini persyaratan yang diberikan kepada masyarakat juga mudah untuk dipenuhi dimana

masyarakat hanya perlu menyediakan lahan dan juga melengkapi persyaratan lain berupa data-data kependudukan yang mudah untuk dipenuhi

3.7 Diskusi Temuan Menarik Lainnya (opsional)

Penulis menemukan yang menjadi Penghambat Belum Optimalnya Implementasi Program Rumah Layak Huni dalam Upaya mengatasi angka Kemiskinan di Kabupaten Alor.

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa Implementasi Program rumah layak Huni Dalam Upaya mengatasi angka Kemiskinan dari sektor Papan di Kabupaten Alor sudah berjalan dengan baik namun belum maksimal. Dikatakan sudah berjalan dengan baik karena dilihat dari adanya sosialisasi Program Pemerintah Tentang Bantuan Rumah Layak Huni, Kejelasan serta mampu dimengerti terkait Standar Operasional Prosedur oleh Pegawai Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan kabupaten Alor Namun masih belum Optimal atau masih belum maksimal pemanfaatannya. Hal ini dikarenakan atau dibuktikan dengan tidak tercapainya Target jumlah Pembangunan rumah layak huni di kabupaten Alor.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada satu kelurahan saja sebagai model studi kasus yang dipilih berdasarkan pendapat Cresswel.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan Pembangunan rumah layak huni di kabupaten Alor untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Dinas Perumahan Rakyat, kawasan permukiman dan Pertanahan Beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L. (2016). Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta.
- Arikunto, S. 2010. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Bogor: Ghalia Indonesia
- Hamdi, M. (2014). Kebijakan Publik; Proses, Analisis dan Partisipasi. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia.
- Moleong, L. J. 2004. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Moleong, L. J. 2016. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mulyadi, Deddy. 2016. Studi Kebijakan Public Dan Pelayanan Publik. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Nasir, M. 2011. Metode Penelitian. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta
- Usman, Nurdin. (2002). Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum. Jakarta: Grasindo.
- Winarno, B. (2014). Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus.
- Abbas, I. (2017). Evaluasi Kebijakan Pembangunan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Miskin Di Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur. Jurnal Paradigma (JP), 4(2), 80-91.
- Afrilan, A. M. (2018). Implementasi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Pada

Layanan Peminjaman Buku Digital Berbasis Aplikasi “PUSNAS”(Studi pada Perpustakaan Nasional Republik Indonesia) (Doctoral dissertation, Universitas Brawijaya).

Safii, S., Kadir, A., & Lubis, Y. A. (2019). Implementasi Program Bantuan Rumah Layak Huni Untuk Masyarakat Kurang Mampu di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau. *Jurnal Ilmu Pemerintahan, Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi (JIPIKOM)*, 1(2), 165-175.

Winarno, B. (2018). Evaluasi Program Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Miskin Di Kabupaten Belitung. *Jurnal Pengemblang Kotla*, 6(1), 66-74.

